
PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DALAM RANGKA MENGENTAS KEMISKINAN DI PEDESAAN

Nasfi

STES Manna Wa Salwa Padang Panjang

nasfi.anwar@gmail.com

Abstract

The rural community economic development program in order to reduce poverty in rural areas is carried out with the development of a balanced industry, improving the structure of agriculture and programs to improve the education of rural communities, so as to maintain urbanization. The next program is to increase rural community empowerment programs by environmental preservation programs and strengthening of rural institutions and facilities and infrastructure. By realizing the horizontal top-down policy that includes rural communities, the government is only the general policy holder. Pilot project program by supporting rural production at a competitive level, by strengthening rural institutionalism and improving information and management for rural communities. Various ways in which countries reduce poverty and hunger through sustainable food production and consumption have been established within the framework of global sustainable development goals. This type of research is a qualitative study, where qualitative research by describing activities, phenomena, opinions / thoughts / views and documents, with data analysis techniques systematically compile the data obtained.

Keywords: Rural Economic Development Program, Rural Poverty Alleviation

Abstrak

Program pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dalam rangka menurunkan kemiskinan di pedesaan dilakukan dengan pengembangan industri yang seimbang, memperbaiki struktur pertanian dan program peningkatan pendidikan masyarakat pedesaan, sehingga mampu mempertahankan urbanisasi. Program selanjutnya peningkatan program pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan cara program pelestarian lingkungan dan penguatan lembaga-lembaga dipedesaan maupun sarana dan prasarana. Dengan merealisasikan melakukan kebijakan top-down secara horizontal yang mengikut sertakan masyarakat pedesaan, pemerintah hanya pemegang kebijakan umum. Program proyek percontohan dengan mendukung produksi pedesaan dalam tingkat persaingan, dengan memperkuat kelambagaan dipedesaan dan peningkatan informasi dan manajemen untuk masyarakat pedesaan. Berbagai cara negara-negara melakukan pengentasan kemiskinan dan kelaparan melalui produksi dan konsumsi pangan berkelanjutan, telah ditetapkan dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan global. Jenis penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif, dimana penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan kegiatan, fenomena, pendapat/pemikiran/pandangan dan dokumen-dokumen, dengan teknik analisa data menyusun secara sistematis data yang diperoleh.

Kata kunci : Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan, Pengentasan Kemiskinan Pedesaan

PENDAHULUAN

Berbagai cara negara-negara melakukan pengentasan kemiskinan dan kelaparan melalui produksi dan konsumsi pangan berkelanjutan telah ditetapkan dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Komitmen negara-negara untuk meningkatkan populasi dunia yang ramah lingkungan merupakan tantangan bagi beberapa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara-negara berkembang, dalam skenario sumber daya alam yang langka, tanah terdegradasi, hilangnya keaneka ragaman hayati, dan iklim ekstrem (Hissa et al., 2019).

Pada tahun 2030, negara-negara penandatangan berkomitmen untuk mencapai target yang berani seperti menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan sambil memastikan sistem produksi pangan yang membantu menjaga ekosistem dan membalikkan degradasi lahan dengan inklusi sosial dan ekonomi (Frison, 2016). Untuk mencapai hasil ini, adopsi teknologi agroekologi akan diperlukan baik dalam sistem pertanian dan pertanian subsisten serta keterlibatan para pemangku kepentingan sosial yang secara historis dikecualikan, seperti petani kecil, keluarga petani, perempuan pedesaan, dan pemuda. Untuk tujuan ini, pemerintah perlu memberikan bantuan teknis, kredit, penelitian, dan infrastruktur untuk mendukung transisi ke sistem yang lebih berkelanjutan, mendorong kebijakan publik yang menghargai wilayah dan peran petani keluarga yang bertanggung jawab untuk memasok pasar konsumen (Frison, 2016).

Di Amerika Latin dan Karibia, diperkirakan ada 17 juta unit produksi keluarga dengan 60 juta orang, setara dengan 75-90% dari semua perusahaan pedesaan di beberapa negara di wilayah tersebut (Salcedo & Guzmán, 2014). Selain menjadi sumber lapangan kerja terbesar di pedesaan dan menghasilkan sebagian besar makanan untuk konsumsi domestik dan pasar lokal di wilayah ini dan biasanya mengembangkan kegiatan pertanian yang beragam yang memberi mereka peran kunci dalam memastikan kelestarian lingkungan dan penyediaan layanan ekosistem dan mendukung konservasi keanekaragaman hayati (Sabourin, Samper, & Massardier, 2014).

Seperti halnya di Indonesia, Bali merupakan Propinsi Wisata, pengembangan desa wisata membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam keseluruhan tahap pengembangan mulai tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Akan tetapi, dalam realitas sering terjadi pengabaian partisipasi masyarakat. Penelitian-penelitian yang dilakukan biasanya bertujuan mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal (Dewi,

2013). Untuk mewujudkan pembangunan pedesaan berbasis lingkungan diperlukan peran dan keikutsertaan masyarakat pedesaan terlibat, dengan demikian masyarakat pedesaan akan peduli terhadap lingkungan yang berkelanjutan, termasuk bagi masyarakat sendiri untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan (S. K. Sari, Afrizal, & Indraddin, 2019).

Bila kita melihat ke Negara Amerika Latin dan Karibia, pertanian keluarga di Brasil sangat ekspresif dalam hal sosial ekonomi dan secara langsung bertanggung jawab atas pangan dan keamanan gizi penduduk. Ini menyumbang sebagian besar produk makanan dasar, seperti singkong, kacang-kacangan, susu, unggas, buah-buahan, dan sayuran. Sektor pertanian keluarga didasarkan pada 4.367.902 unit produksi yang mewakili 84% dari semua unit pedesaan, dengan ukuran rata-rata 18,4 hektar. Pertanian keluarga mencakup 12,3 juta orang, yang merupakan 74,4% dari personel yang bekerja di pertanian Brasil. Dalam hal pendapatan, pertanian berbasis keluarga menghasilkan nilai produksi kotor hampir 90% lebih tinggi dari pada pertanian non-keluarga (Agropecuário, 2006).

Mempertimbangkan pendaftaran agro industri dalam rantai pasokan makanan, peran pertanian jelas melampaui partisipasi rendahnya dalam PDB negara. Selain tomat dan tebu, produk pertanian utama dalam hal pendapatan yang dihasilkan adalah buah dan sayuran, yang paling akhir diproduksi oleh keluarga petani (Gilio, Silva, de Camargo Barros, Fachinello, & Castro, 2016). Akibatnya besar produksi Pertanian dalam 3 tahun terakhir mengalami siklus penggunaan lahan yang berturut-turut dan tidak berkelanjutan yang mengarah pada deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, dan perubahan proses pengisian ulang secara hidrologi, yang berpuncak pada degradasi sumber daya alam di bioma Hutan Atlantik dan pemiskinan pedesaani (Nehren, Schlüter, Raedig, Sattler, & Hissa, 2018).

Dengan demikian untuk mengembalikan lingkungan, bagaimana perlu dilakukan upaya pemerintah upaya untuk menetapkan pembangunan ekonomi pedesaan berdasarkan peningkatan produktifitas dan melibatkan masyarakat pedesaan dalam pembangunan lingkungan, sehingga fungsi ekosistem dan perspektif baru yang kaya dan ramah lingkungan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, saya sebagai penulis tertarik untuk menulis artikel judul “ Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dalam Rangka Mengetas Kemiskinan di Pedesaan”.

TELAAH PUSTAKA

1. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Blackburn (1989) dalam (Nasdian, 2014), pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan konsep dasar yang mengaris bawahi sejumlah istilah yang telah digunakan sejak lama. Istilah-istilah seperti *community resource developmen*, *rural areas development*, *community economic development*, *rural revitalisation*, dan *community based development*.

Pengembangan masyarakat terutama masyarakat pedesaan bermakna dua konsep menurut (Nasdian, 2014), dimana konsep ;

- a) *Community*, merupakan kualitas hubungan sosial dan development.
- b) Dengan perubahan ke arah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual, makna penting untuk pengembangan masyarakat sesungguhnya.

Penelitian lain mengatakan pengembangan masyarakat pedesaan adalah bagaimana konseptualisasi pembangunan bersifat "*Bottom up*", dengan memberdayakan dan menciptakan aspek kebijakan strategis dengan kelembagaan di pedesaan seperti BUMDes, dengan demikian diharapkan mampu memberdayakan potensi-potensi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan dipedesaan (Y. W. Sari, 2018).

2. Perekonomian Suatu Negara

Robert L. Tignor (2006) mengatakan dalam Lewis perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua sektor (Tignor, 2006) ;

- a) Sektor pedesaan yang tradisional yaitu sektor pertanian yang surplus terhadap tenaga kerja, sesuai dengan penelitian Gollin (Gollin, 2014).
- b) Industri perkotaan yang modern membutuhkan tenaga kerja yang tinggi, yang berasal dari pedesaan yang tenaga kerjanya surplus (Portes & Benton, 1984).

Berdasarkan penelitian dan ahli diatas, dimana perekonomian pedesaan akan mengakibatkan terjadi kemiskinan, dimana tenaga kerja dipedesaan yang surplus dan kurang lahan yang akan digarap, mereka akan urbanisasi ke kota yang permintaan terhadap tenaga kerjanya tinggi dengan tingkat upah yang lebih tinggi dari pedesaan.

3. Teknologi Pertanian

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, karena desa identik dengan pertanian maka pemerintah terkait perlu menerapkan teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil panen, mengurangi kerusakan tanah , teknologi yang diterapkan akan

menghindari terjadinya urbanisasi, karena hasil panen melimpah dan lahan-lahan bisa digarap dengan teknologi, panen biasanya 1X dalam setahun dengan teknologi akan bisa menjadikan panen 3-4X setahun (Manos, Papathanasiou, Bournaris, Paparrizou, & Arabatzis, 2009).

Pengembangan dan pengaplikasian inovasi teknologi hidroponik sistem *Wick* sebagai usaha menunjang ketersediaan stok sayuran di pasaran Ibukota Provinsi Riau telah berhasil membuka wawasan petani akan adanya sistem pertanian modern untuk produksi sayur-mayur skala rumah tangga, berpotensi untuk dikembangkan secara masal dalam memenuhi permintaan pasar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani di Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar. Kegiatan ini adalah langkah awal dalam rangka memaksimalkan potensi daerah pinggiran kota sebagai daerah *urban farming* (Fitmawati, Isda, Isnaini, Sofiyanti, & Roza, 2019).

4. Peran Industri dalam Pembangunan Pedesaan

Dalam rangka pengembangan pedesaan diperlukan program Investasi dipedesaan yang berorientasi kepada ekspor, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang cepat dengan kemampuan inovatif yang tinggi (Kniivilä, 2007).

Menurut Saragih (2001) dalam Syahza, sektor agribisnis sebagai sektor ekonomi rakyat masih memiliki prospek cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun andalan Indonesia dalam perdagangan bebas, untuk itu keharusan untuk pengembangan pertanian secara teknologi modern, karena organisasi dipedesaan berfungsi sebagai lembaga pengembangan produk pertanian (Syahza, 2003).

5. Pengembangan Wirausaha di Pedesaan

Untuk mengembangkan ekonomi pedesaan yang identik dengan pertanian, maka perlu ditumbuhkan dan dikembangkan jiwa kewirausahaan di sektor pertanian, dan ini yang dilakukan oleh seluruh dunia sekarang ini. Sehingga bidang kewirausahaan di bidang pertanian, produksi pangan dan pembangunan pedesaan bisa berjalan sesuai dengan rencana pemerintah, untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi urbanisasi keperkotaan dari masyarakat pedesaan (Alsos, Carter, & Ljunggren, 2011).

Spillane (1987) dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya” menyebutkan bahwa aspek ekonomi pariwisata paling tidak terkait dengan lima hal, yaitu: (1) lokasi industri pariwisata; (2) sifat khusus industri pariwisata; (3) aspek penawaran pariwisata; (4) aspek permintaan industri pariwisata; dan (5) pasar industri pariwisata. Di

dalam Spillane (1987), disebutkan bahwa pasar industri pariwisata di Indonesia setidaknya bisa diidentifikasi dengan 3 (tiga) faktor utama, yaitu susunan pasar menurut penghasilan konsumen, pemasaran, dan fasilitas angkutan, pelayanan, dan pola perjalanannya (Adi & Mulyadi, 2019).

6. Modal Manusia dan Transformasi Pedesaan

Evolusi pemahaman kolektif kami tentang masyarakat pedesaan dan bagaimana mereka berubah, sejak fokus sektoral awal pada masyarakat pertanian dan pengembangan pertanian, melalui ide-ide saat ini yang menekankan pada pembangunan "tempat" dan "berbasis penempatan". Perubahan pedesaan selalu dikonseptualisasikan sebagai hasil dari interaksi faktor global dan lokal. Masyarakat pedesaan menanggung warisan besar dari struktur dan sangat mengakar, sulit untuk mengubah lembaga yang telah berulang kali menunjukkan kekuatan mereka dalam memediasi efek lokal dari kekuatan global dan dalam mengalahkan kebijakan "terbaik" desain. Namun masyarakat pedesaan setempat hampir tidak otonom dari kekuatan global yang memengaruhi mereka baik secara aktif maupun karena kelalaian. Memang, untuk dilewati oleh kekuatan diversifikasi ekonomi, integrasi ke dalam sistem pangan pertanian regional, nasional, dan global, dan urbanisasi kemungkinan besar berarti bahwa daerah akan dibiarkan (Berdegue, Rosada, & Bebbington, 2013).

7. Konservasi Lahan Pedesaan

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan dampak konservasi lahan pedesaan terhadap masyarakat pedesaan diantaranya ;

- a) Hilangnya mata pencarian masyarakat pedesaan dan terjadi perubahan mata pencaharian dari pertanian ke non pertanian akibatnya terjadi pengangguran dengan beralihnya lahan pertanian untuk pembangunan yang direncanakan pemerintah (Nurjanah & Purwandari, 2012).
- b) Meningkatkan transaksi jual beli lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian, akibatnya menciptakan pengangguran karena menurunnya jumlah lahan pertanian (Winarso, 2017).
- c) Akibat konservasi lahan terjadi perubahan kultur, budaya dan sosial masyarakat, lama kelamaan masyarakat yang tidak bisa menyaring secara pendidikan akan terjadi pengangguran dan tingkat kejahatan di pedesaan (Puspaningrum, 2011).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif, dimana penelitian kualitatif menurut A.M Yusuf (2016) dengan mencakup 1) *Mendiskripsikan* kegiatan, fenomena yang menyangkut hubungan dengan manusia, 2) Pendapat/pemikiran/pandangan dari orang yang berpengalaman, 3) *Cuplikan* berupa dokumen, laporan, arsip dan sejarah, dan 4) *deskripsi* tingkah laku seseorang (Yusuf, 2016). Sumber data penelitian menggunakan data sekunder dan primer berupa buku-buku dengan teknik yang digunakan penelitian pustaka (*library research*) (Simanjuntak & Sosrodiharjo, 2014). Penelitian dengan teknik analisa data bagaimana menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan baik berupa catatan maupun dokumen dan data tersebut dipelajari dan dibuatkan kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis sendiri maupun orang lain yang membacanya, ini sesuai dengan penelitian Nasfi dkk (2019) (Nasfi, Sabri, & Moni, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Pembangunan Masyarakat Pedesaan

A. Mempertahankan Urbanisasi

Perkembangan ekonomi berkembang pesat, maka terjadi urbanisasi secara cepat, masyarakat meninggalkan desa, meninggalkan pertanian, akibatnya terjadi transfer tanah ke penggunaan lain, sehingga terjadi kerusakan lingkungan dan ekosistem di pedesaan, sehingga tercipta kemiskinan-kemiskinan baru di pedesaan, akibatnya masyarakat pedesaan mentransfer penggunaan lahan pertanian untuk menutupi kebutuhan hidup dengan merusak lingkungan (Guo, Lin, & Su, 2019).

Untuk menghindari kemiskinan akibat urbanisasi diantaranya yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat pedesaan diantaranya ;

- 1) Pengembangan Industri harus mempunyai syarat yang lengkap untuk menghindari urbanisasi ke kota, diantaranya keuangan, jalan, informasi dan budaya sehingga pengembangan antara kota dan desa seimbang.
- 2) Memperbaiki struktur pertanian, cara pengolahan lahan, pemasaran produk pertanian dengan harapan kemampuan lahan pertanian di pedesaan menyerap tenaga kerja dan tidak terjadi surplus tenaga kerja.
- 3) Menciptakan dan meningkatkan agroindustri untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sehingga terhindar urbanisasi ke kota.

- 4) Meningkatkan pendidikan masyarakat pedesaan, dengan pendidikan akan tercipta pertanian tradisional berubah ke pertanian yang modern, sehingga tercipta peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan untuk menghindari urbanisasi.

B. Memberdayakan Masyarakat Pedesaan

Indonesia bisa mencontoh yang telah dilakukan oleh negara-negara lain yang telah berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat di pedesaan, seperti Ukraina yang menyiratkan output PDB pada tahun 2030 mengacu pada sepenuhnya mengadaptasi praktik-praktik komunitarian terkait pertanian, kehutanan dan menyelesaikan restrukturisasi daerah pedesaan. Inilah sebabnya mengapa penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam tindakan penghijauan dan konservasi, bersama dengan melibatkan mereka dalam melindungi monumen yang relevan secara historis. Untuk menghilangkan kemiskinan dan migrasi ke daerah perkotaan, daerah pedesaan adalah yang paling terkena dampak perubahan iklim, yang mencemari udara, air, tanah, mengurangi ukuran hutan melalui pembukaan yang semrawut, kepunahan sejumlah tumbuhan dan hewan yang penting, dan kehabisan sumber energi yang tidak dapat diperbarui (Walker & Plotnikova, 2018).

Langkah memberdayakan masyarakat pedesaan yang harus dilakukan pemerintah pedesaan dan masyarakat pedesaan menghindari dan mengurangi kemiskinan diantaranya adalah ;

- 1) Program melestarikan lingkungan, dengan mengajak masyarakat pedesaan terlibat dan menjaganya.
- 2) Penguatan kelembagaan pedesaan berupa lembaga keuangan, kesehatan dan pendidikan.
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi pedesaan.

C. Kebijakan *Top-Down* dengan Kemitraan

Secara Khusus tantangan pembangunan pedesaan dengan menekankan pentingnya koordinasi vertikal untuk pembuatan kebijakan pedesaan, pandangan seperti ini dimasukkan juga dalam peraturan pembangunan pedesaan di belahan negara lain seperti di Eropa, koordinasi vertikal berlangsung melalui intraksi multi level yang melibatkan aktor negara dan non negara mencakup dalam pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan mendorong pendekatan *bottom-up*. Disini peran pemerintah dalam

berinvestasi dalam pengembangan dan pembangunan pedesaan, dengan kata lain kebijakan pedesaan membutuhkan kerjasama horizontal melalui interaksi dengan masyarakat pedesaan (Koopmans, Rogge, Mettepenningen, Knickel, & Sandra, 2017).

Pendekatan *top-down* dilaksanakan dengan *blue print strategy* (cetak biru) yang bersumber dari pemerintah dengan masyarakat hanyalah sebagai sasaran atau obyek pembangunan saja. Sebaliknya, pendekatan *bottom-up* adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan, sehingga masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi atau sering juga disebut dengan *people centered development*. (Harmawati & Lubis, 2018).

Pembangunan pedesaan yang paling baik dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan memadukan pendekatan *top-down* namun program pemerintah hanya bersifat umum dengan kebijakan (*policy*), namun masyarakat lokal mengikuti kebijaksanaan umum dari apa yang diinginkan oleh masyarakat desa, pembangunan pedesaan sesuai dengan tingkat sosial, budaya dan kebiasaan mereka yang tidak merusak lingkungan dan menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Meningkatkan Program Proyek Percontohan kebijakkan Publik

Pengembangan masyarakat pedesaan dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, bisa dilakukan dengan mencontoh kasus-kasus dinegara lain seperti Pedesaan RIO De Jeneiro dengan pengembangan proyek sistem pertanian yang berkelanjutan terintegrasi, dengan tujuan proyek percontohan ini untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan peluang bagi petani di pedesaan, sehingga sosial dan lingkungan serta partisipatif masyarakat pedesaan, dengan mengutamakan pendekatan terintegrasi, dan terkoordinasi untuk intervensi publik dan swasta dalam bidang pertanian, (Hissa et al., 2019) ;

a) *Mendukung produksi pedesaan dan daya saing* memberikan bantuan kepada penerima manfaat pedesaan dengan bekerja bersama kelompok masyarakat di tingkat lokal, kota, dan regional. Untuk meningkatkan keterampilan organisasi dan partisipasi melalui pengembangan kapasitas dan kegiatan perencanaan. Komponen ini juga bertujuan untuk mengoperasikan perubahan dalam proses produksi pedesaan dalam kerangka pengembangan pertanian berbasis pasar yang fokus pada peningkatan dan peningkatan produktivitas petani kecil. Ini juga membantu membangun kembali lingkungan produktif

para petani kecil yang terkena dampak bencana alam maupun dalam penurunan produktifitas pertanian di wilayah pedesaan.

- b) *Memperkuat kerangka kerja kelembagaan* berupaya meningkatkan kerangka kerja kelembagaan negara yang mendukung pengembangan pertanian berbasis pasar dengan ;
 - 1) Memperkuat lembaga-lembaga pedesaan dan mekanisme koordinasi.
 - 2) Meningkatkan mekanisme dukungan keuangan publik dan swasta.
 - 3) melakukan jaringan penelitian partisipatif untuk memfasilitasi transfer pengetahuan agroekologis antara penelitian pertanian dan layanan penyuluhan dan petani.
- c) *Koordinasi proyek dan manajemen informasi* mendukung keseluruhan manajemen proyek, koordinasi dan implementasi, pemantauan dan evaluasi, serta penyebaran informasi pembangunan pedesaan utama yang berkelanjutan di bawah proyek dengan membiayai (1) koordinasi proyek dan (2) manajemen informasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Program-program pengembangan ekonomi pedesaan dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan secara garis besar dapat dilakukan oleh pemerintah terkait maupun masyarakat pedesaan diantaranya dengan program pembangunan masyarakat pedesaan dan meningkatkan program proyek percontohan di pedesaan. Program pembangunan masyarakat pedesaan dalam rangka menurunkan kemiskinan di pedesaan dilakukan dengan pengembangan industri yang seimbang, memperbaiki struktur pertanian dan program peningkatan pendidikan masyarakat pedesaan, sehingga mampu mempertahankan urbanisasi. Program selanjutnya peningkatan program pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan cara program pelestarian lingkungan dan penguatan lembaga-lembaga dipedesaan maupun sarana dan prasarana. Dengan merealisasikan melakukan kebijakan *top-down* secara horizontal yang mengikut sertakan masyarakat pedesaan, pemerintah hanya pemegang kebijakan umum.

Program proyek percontohan dengan mendukung produksi pedesaan dalam tingkat persaingan, dengan memperkuat kelembagaan dipedesaan dan peningkatan informasi dan manajemen untuk masyarakat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. N. R., & Mulyadi, M. (2019). Mediasi Community Based Tourism Pada Pengaruh Peran Desa Adat Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14(3), 2267–2280.
- Agropecuário, I. C. (2006). Agricultura Familiar: Primeiros Resultados 2006. *Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística–IBGE*.
- Alsos, G. A., Carter, S., & Ljunggren, E. (2011). *The handbook of research on entrepreneurship in agriculture and rural development*. Edward Elgar Publishing.
- Berdegú, J. A., Rosada, T., & Bebbington, A. J. (2013). Rural transformation.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2).
- Fitmawati, F., Isda, M. N., Isnaini, I., Sofiyanti, N., & Roza, R. M. (2019). Inovasi teknologi hidroponik melalui pemanfaatan barang bekas dan nutrisi buatan sendiri sebagai usaha peningkatan pendapatan petani di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, pp. 499–505).
- Frison, E. A. (2016). From uniformity to diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems.
- Gilio, L., Silva, A. F., de Camargo Barros, G. S., Fachinello, A. L., & Castro, N. R. (2016). O Agronegócio em Minas Gerais: Evolução do Produto Interno Bruto entre 2004 e 2015. *Revista de Economia E Agronegócio*, 14(1, 2, 3).
- Gollin, D. (2014). The Lewis model: A 60-year retrospective. *Journal of Economic Perspectives*, 28(3), 71–88.
- Guo, S., Lin, L., & Su, S. (2019). Interactions between sustainable livelihood of rural household and agricultural land transfer in the mountainous and hilly regions of Sichuan , China, (November 2018), 1–18. <https://doi.org/10.1002/sd.1937>
- Harmawati, Y., & Lubis, B. P. M. (2018). Warga Negara dan Masalah Kontemporer dalam Paradigma Pembangunan. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 71–78.

- Hissa, H. R., Alves Filho, N. T., Costa, M., Strauch, G., Bassi, L., & de Assis, R. L. (2019). Sustainable rural development in Rio de Janeiro state: the Rio rural program. In *Strategies and Tools for a Sustainable Rural Rio de Janeiro* (pp. 23–39). Springer.
- Kniivilä, M. (2007). Industrial development and economic growth: Implications for poverty reduction and income inequality. *Industrial Development for the 21st Century: Sustainable Development Perspectives*, 1(3), 295–333.
- Koopmans, M. E., Rogge, E., Mettepenningen, E., Knickel, K., & Sandra, S. (2017). The role of multi-actor governance in aligning farm modernization and sustainable rural development, 1–11.
- Manos, B., Papathanasiou, J., Bournaris, T., Paparrizou, A., & Arabatzis, G. (2009). Simulation of impacts of irrigated agriculture on income, employment and environment. *Operational Research*, 9(3), 251–266.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasfi, N., Sabri, S., & Moni, R. (2019). Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam. *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 4(02), 98–107.
- Nehren, U., Schlöter, S., Raedig, C., Sattler, D., & Hissa, H. (2018). *Strategies and Tools for a Sustainable Rural Rio de Janeiro*. Springer.
- Nurjanah, E. N., & Purwandari, H. (2012). ALIH FUNGSI LAHAN: POTENSI PEMICU TRANSFORMASI DESA-KOTA (Studi Kasus Pembangunan Terminal Tipe A “Kertawangunan”). *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 6(3), 53–68.
- Portes, A., & Benton, L. (1984). Industrial development and labor absorption: A reinterpretation. *Population and Development Review*, 589–611.
- Puspaningrum, D. (2011). Pelembagaan program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (phbm) dan dampaknya bagi masyarakat desa hutan. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 5(3), 1–14.
- Sabourin, E., Samper, M., & Massardier, G. (2014). Políticas públicas para as agriculturas familiares: existe um modelo Latino-americano?
- Salcedo, S., & Guzmán, L. (2014). Agricultura familiar en América Latina y el Caribe: recomendaciones de política. *Santiago: FAO*.

-
- Sari, S. K., Afrizal, A., & Indraddin, I. (2019). Keberhasilan PKBI Sumatera Barat Dalam Mewujudkan Perilaku Sehat Kolektif Pada Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)(Suatu Studi Pemberdayaan Komunitas). *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1), 49–68.
- Sari, Y. W. (2018). BUMDESA (BADAN USAHA MILIK DESA) SEBAGAI KELEMBAGAAN PARTISIPATORIS UNTUK PENGEMBANGAN IDENTIFIKASI POTENSI MASYARAKAT PEDESAAN. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 298–302.
- Simanjuntak, B. A., & Sosrodiharjo, S. (2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syahza, A. (2003). Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau Modeling Of Economic Empowerment Of Rural Community Based On Agro-Business Activities In Riau. *Pembangunan Pedesaan*, 3(2).
- Tignor, R. L. (2006). *W. Arthur Lewis and the birth of development economics*. Princeton university press.
- Walker, K., & Plotnikova, M. (2018). Ecological settlement as a self-government model in rural areas. *Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development*, 40(3), 416–423.
- Winarso, B. (2017). Dinamika pola penguasaan lahan sawah di wilayah pedesaan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 12(3).
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.